

STRATEGI KOMUNIKASI DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM MENANGANI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DI KOTA SAMARINDA

Samsul Bahri ¹

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Komunikasi Dinas Kesejahteraan Sosial dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Samarinda. Sehingga aktivitas dari para penyandang masalah kesejahteraan sosial bisa dapat ditekan dan membantu mereka untuk tidak lagi melakukan aktivitas mereka kembali. Sehingga mereka dapat hidup mandiri dan tidak lagi mengganggu ketertiban umum .

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai fenomena yang terjadi dalam kaitannya dengan Strategi Komunikasi Dinas Kesejahteraan Sosial Dalam Menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kota Samarinda, akan dianalisis melalui metode analisis data model domain dan di dukung dengan data, baik yang bersifat sekunder maupun primer.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi Komunikasi Dinas Kesejahteraan Sosial Dalam Menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kota Samarinda, sudah cukup baik namun strategi komunikasi yang mereka lakukan belumlah maksimal. Dimana dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaannya, strategi komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial hanya dengan melakukan penyuluhan saja. Dan dari penyuluhan itu sendiri dilaksanakan setiap 4 kali dalam setahun.

Kata Kunci: *Strategi Komunikasi, Dinas Kesejahteraan Sosial, Penyuluhan, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda.*

Pendahuluan

Indonesia merupakan bangsa yang besar dengan daerah yang luas. Pada setiap daerah saling berlomba-lomba membangun daerahnya masing-masing di segala bidang untuk lebih maju, unggul dan bermartabat demi kesejahteraan bangsa. Dalam pembangunan tersebut, ada dampak positif dan negatif yang tampaknya semakin sulit untuk dihindari dalam pembangunan, sehingga selalu diperlukan usaha untuk lebih mengembangkan dampak positif pembangunan serta mengurangi dan mengantisipasi dampak negatifnya. Penyandang masalah

¹ Mahasiswa Program studi S1 Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Mulawarman. Samarinda. Email : smsl_bhr@yahoo.co.id

kesejahteraan sosial (PMKS) seperti gelandangan, pengemis, anak jalanan (anjali), wanita tuna susila (WTS), penjual koran, waria, pengamen, anak punk dan penjual asongan merupakan salah satu dampak negatif pembangunan, khususnya pembangunan di perkotaan.

Menurut Wirosardjono (1997:30) menyatakan bahwa: “secara konseptual gelandangan adalah lapisan sosial, ekonomi dan budaya dalam stratifikasi masyarakat kota. Masalah umum tuna sosial seperti gelandangan, pengemis, anak jalanan (anjali), wanita tuna susila (WTS), penjual koran, waria, pengamen, anak punk dan penjual asongan pada hakikatnya erat terkait dengan masalah ketertiban dan keamanan yang mengganggu ketertiban dan keamanan di daerah perkotaan seperti mengemis dan meminta belas kasihan dari orang lain, mengganggu kenyamanan masyarakat dan tentunya keberadaan dari mereka dapat mengganggu ketertiban umum di wilayah perkotaan. Untuk mengatasi permasalahan tuna sosial, tentulah ada landasan hukum yang menjadi dasar dalam penanganan masalah tersebut. Ada beberapa yang menjadi dasar landasan hukum yang menjadi dasar dalam menangani permasalahan tuna sosial di Kota Samarinda yaitu sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
3. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan dalam wilayah Kota Samarinda.
4. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial di wilayah Kota Samarinda.
5. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda Nomor 460/242/III/PRS-3/DKS/2012 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) jalanan Kota Samarinda tahun 2012.

Berikut jumlah gelandangan dan pengemis (gepeng) yang tertangkap selama kurun waktu lima tahun di Kota Samarinda dalam tabel berikut ini:

No.	Tahun	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tertangkap
1.	2007	192 orang
2.	2008	190 orang
3.	2009	132 orang
4.	2010	105 orang
5.	2011	127 orang
Jumlah		746 orang

(Sumber: kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda)

Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana Strategi Komunikasi Dinas Kesejahteraan Sosial dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Samarinda ditahun 2012?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Komunikasi Dinas Kesejahteraan Sosial dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Samarinda.

Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya perbendaharaan kepustakaan bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi jurusan ilmu komunikasi khususnya yang berkaitan dengan strategi komunikasi Dinas Kesejahteraan Sosial dalam menangani masalah tuna sosial atau penyandang masalah kesejahteraan sosial.
2. Secara praktis diharapkan dapat berguna bagi kedua belah pihak, baik pihak Dinas Kesejahteraan Kota Samarinda dan juga kalangan Masyarakat. Dimana hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan informasi dan evaluasi serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan pola hidup mandiri.

Kerangka Dasar Teori

SMCR

SMCR atau Model SMCR dalam komunikasi merupakan teori komunikasi yang mendasari proses komunikasi. Rumus S-M-C-R atau juga dikenal dengan Model Komunikasi K. Berlo adalah singkatan dari istilah-istilah: S singkatan dari source yang berarti sumber atau komunikator. M singkatan dari message yang berarti pesan. C singkatan dari channel yang berarti saluran atau media. R singkatan dari *receiver* yang berarti penerima atau komunikan. Di samping itu, terdapat tiga unsur lain yaitu *feedback* (tanggapan balik), efek dan lingkungan. (Dewi, 2004:4).

Komunikasi

Istilah komunikasi atau dalam Bahasa Inggris *communication* berasal dari kata Latin *communicatio*, dan bersumber dari kata *communis* yang berarti sama. Sama disini maksudnya adalah sama makna. Komunikasi adalah proses interaksi

antara dua orang atau lebih yang di antara mereka atau salah satu dari mereka merupakan penyampai pesan atau biasa disebut komunikator, dan terdapat unsur pesan atau berupa stimulus yang biasa disebut *messages* atau *pesan*, melalui media kepada penerima atau komunikan. Itu merupakan pengertian komunikasi secara umum dan luas.

Kemudian Everett M. Rogers, komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih, dengan maksud untuk mengubah tingkah mereka. (Cangara, 2005:33). Berikut Shannon dan Weaver (1949), bahwa komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling pengaruh mempengaruhi satu sama lainnya, sengaja atau tidak sengaja. Tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi. (Cangara, 2005:33).

Komunikasi Pembangunan

Dalam arti sempit, komunikasi pembangunan merupakan segala upaya, cara dan teknik penyampaian gagasan dan keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan kepada masyarakat yang menjadi sasaran, agar dapat memahami, menerima dan berpartisipasi dalam pembangunan. Sedangkan dalam arti luas komunikasi pembangunan adalah peran dan fungsi komunikasi sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik di antara masyarakat dan pemerintah, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

Peran yang bisa dilakukan komunikasi dalam pembangunan menurut Hedebrö (1979) (dalam Nasution, 2004) yaitu:

1. Komunikasi dapat menciptakan iklim bagi perubahan dengan membujuk nilai-nilai, sikap, mental, dan bentuk perilaku yang menunjang modernisasi.
2. Komunikasi dapat mengajarkan keterampilan baru, baca tulis hingga lingkungan.
3. Media massa dapat bertindak sebagai pengganda sumber-sumber daya pengetahuan.
4. Media massa dapat mengantarkan pengalaman-pengalaman yang seolah-olah dialami sendiri sehingga mengurangi biaya psikis dan ekonomis dalam kepribadian.
5. Komunikasi dapat meningkatkan aspirasi sebagai perangsang untuk bertindak.
6. Komunikasi dapat membantu masyarakat menemukan norma-norma baru dan harmonisasi masa transisi.
7. Komunikasi dapat membuat orang lebih condong untuk berpartisipasi membuat keputusan dalam masyarakat.

8. Komunikasi dapat mengubah struktur kekuasaan pada masyarakat tradisional dengan pengetahuan massa melalui informasi.
9. Komunikasi dapat menciptakan rasa kebangsaan sebagai sesuatu yang mengatasi kesetiaan lokal.
10. Komunikasi dapat membantu eksistensi mayoritas populasi sebagai warga negara, sehingga membantu meningkatkan aktivitas politik.
11. Komunikasi dapat memudahkan perencanaan dan implementasi program pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan penduduk.
12. Komunikasi dapat membuat pembangunan ekonomi, sosial dan politik menjadi suatu proses yang berlangsung sendiri.

Millennium Development Goals (MDGs)

Millennium Development Goals (MDGs) atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Tujuan Pembangunan Milenium, adalah sebuah paradigma pembangunan global, dideklarasikan Konperensi Tingkat Tinggi Milenium oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York pada bulan September 2000. Dasar hukum dikeluarkannya deklarasi MDGs adalah Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 55/2 Tanggal 18 September 2000, (A/Ris/55/2 United Nations Millennium Development Goals).

Semua negara yang hadir dalam pertemuan tersebut berkomitmen untuk mengintegrasikan MDGs sebagai bagian dari program pembangunan nasional dalam upaya menangani penyelesaian terkait dengan isu-isu yang sangat mendasar tentang pemenuhan hak asasi dan kebebasan manusia, perdamaian, keamanan, dan pembangunan. Deklarasi ini merupakan kesepakatan anggota PBB mengenai sebuah paket arah pembangunan global yang dirumuskan dalam beberapa tujuan yaitu:

1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan,
2. Mencapai Pendidikan Dasar untuk semua,
3. Mendorong Kesetaraan Gender, dan Pemberdayaan Perempuan,
4. Menurunkan Angka Kematian Anak,
5. Meningkatkan Kesehatan Ibu,
6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya,
7. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup, dan Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan.

Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi merupakan paduan dari perencanaan komunikasi (*communication planning*) dan manajemen komunikasi (*communication management*) untuk mencapai satu tujuan. Untuk mencapai satu tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (*approach*) bisa berbeda

sewaktu-waktu bergantung dari situasi dan kondisi. Dengan demikian, strategi komunikasi, baik secara makro (*planned multi-media strategy*) maupun secara mikro (*single communication medium strategy*) mempunyai fungsi ganda: Pada istilah lain strategi komunikasi adalah metode atau langkah-langkah yang diambil untuk keberhasilan proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat atau perilaku, baik secara langsung, secara lisan maupun tidak langsung melalui media (Effendy 2008:5).

Banyak teori komunikasi yang sudah ditengahkan oleh para ahli, tetapi untuk strategi komunikasi barangkali yang memadai baiknya untuk dijadikan pendukung strategi komunikasi ialah apa yang dikemukakan oleh Harold D. Lasswell yang terkenal itu yang dimua dalam buku "*The Communication of Ideas*" suntingan Lyman Bryson. Harold D. Lasswell menyatakan bahwa cara yang terbaik untuk menerangkan kegiatan komunikasi ialah menjawab "*Who Says What In Which Channel To Whoam With What Effect?*".

Kesejahteraan Sosial

Istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) tidak merujuk pada suatu kondisi yang baku dan tetap. Istilah ini dapat berubah-ubah karena ukuran sejahtera atau tidak sejahtera kadang-kadang berbeda anantara satu ahli dengan ahli lainnya. Menurut James Midgley (1997:5) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi yang harus memenuhi tiga syarat utama:

1. Setiap orang diharapkan dapat mengatur masalah sosial dengan baik karena belum tentu setiap orang memiliki kemampuan *management* yang baik terhadap masalah sosial yang dihadapinya. Kaya atau miskin pasti akan menghadapi suatu masalah tetapi memiliki kemampuan yang berbeda dalam menghadapi masalah tersebut. Kesejahteraannya tergantung kepada kemampuannya dalam menghadapi dan menyelesaikan setiap masalah.
2. Setiap individu, keluarga, kelompok dan masyarakat secara keseluruhan memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan tersebut tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga menyangkut keamanan, kesehatan, pendidikan, keharmonisan dalam pergaulan dan kebutuhan non-ekonomi lainnya.
3. Untuk merealisasikan setiap potensi yang ada dari anggota masyarakat perlu ada langkah memaksimalkan peluang-peluang sosial. Pemerintah dapat memperbesar peluang tersebut dengan meningkatkan program pendidikan maupun menciptakan sistem sosial yang mendukung bagi setiap warganya untuk memperoleh apa yang diinginkannya.

Tujuan Kesejahteraan Sosial

Adapun tujuan dari kesejahteraan sosial yang sebagai sistem mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik.

Leonard Schneiderman, berdasarkan rumusan atau pendapat PBB dan beberapa ahli bidang kesejahteraan sosial secara terperinci menguraikan tujuan-tujuan sistem kesejahteraan sosial.

1. Sistem pemeliharaan
2. Sistem Kontrol
3. Sistem Perubahan

Memperhatikan ketiga tujuan di atas, pelaksanaannya dapat dilihat pada program-program kesejahteraan sosial misalnya seperti program-program pengembangan masyarakat, ketenagakerjaan, kesehatan, kesejahteraan keluarga, kesejahteraan anak yang semuanya bertujuan untuk mencapai sasaran pemeliharaan, kontrol, dan perubahan.

Fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi kesejahteraan sosial adalah mengorganisasi dari adanya disorganisasi. Pengertian reorganisasi mempunyai ukuran yang luas dan mendalam sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang mencakup pemulihan serta pemberian peranan-peranan baru. Pada dasarnya fungsi-fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan perubahan-perubahan sosial ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negatif terhadap pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa fungsi-fungsi dari kesejahteraan sosial yaitu:

1. Fungsi Penyembuhan (*Curative*)
2. Fungsi Pencegahan (*Preventive*)
3. Fungsi Pengembangan (*Development*)
4. Fungsi Penunjang (*Supportive*)

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, atau gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/ketertinggalan, dan bencana alam maupun bencana sosial. Masalah-masalah kesejahteraan sosial, secara umum timbulnya dapat disebabkan oleh 2 (dua) faktor, yaitu:

1. Faktor dari dalam diri individu, misalnya karena cacat fisik sehingga tidak mampu menjalankan fungsi sosial.
2. Faktor dari luar diri individu, misalnya dari lingkungan fisik maupun lingkungan sosial.

Dasar Masalah Kesejahteraan Sosial

Jenis masalah kesejahteraan sosial ada banyak. Berikut ini akan dikemukakan lima jenis hambatan yang merupakan dasar daripada masalah kesejahteraan sosial yaitu:

1. Ketergantungan ekonomi.
2. Ketidakmampuan menyesuaikan diri.
3. Kesehatan yang buruk.
4. Kurang atau tidak adanya pengisian waktu senggang dan sarana rekreasi.
5. Kondisi sosial, penyediaan dan pengelolaan pelayanan sosial yang kurang baik atau tidak baik

Jenis Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Berdasarkan Kementerian Sosial Republik Indonesia, ada beberapa jenis-jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu sebagai berikut:

1. Anak Balita Telantar
2. Anak Telantar
3. Anak Nakal
4. Anak Jalanan
5. Wanita Rawan Sosial Ekonomi
6. Korban Tindak Kekerasan
7. Lanjut Usia Telantar
8. Penyandang Cacat,
9. Tuna Susila
10. Pengemis
11. Gelandangan
12. Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK)
13. Korban Penyalahgunaan NAPZA
14. Keluarga Fakir Miskin
15. Keluarga Berumah Tidak Layak Huni
16. Keluarga Bermasalah Sosial Psikolo
17. Komunitas Adat Terpencil
18. Korban Bencana Alam
19. Korban Bencana Sosial atau Pengungsi
20. Pekerja Migran Telantar
21. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
22. Keluarga Rentan

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat serta hubungan antara hubungan antara fenomena yang diselidiki, tanpa suatu maksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.

Fokus Penelitian

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah perencanaan-perencanaan komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda dalam menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang telah peneliti fokuskan dan dilaksanakan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda dalam menyampaikan pesan adalah secara langsung dengan melakukan komunikasi tatap muka. Maka yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Sumber pesan
2. Isi pesan
3. Saluran pesan
4. Efek pesan

Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan sebagai sumber memperoleh data untuk penulisan skripsi ini. Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* (Soegiyono, 2006: 216), yaitu pemilihan sampel berdasarkan pada karakteristik tertentu, dengan sebanyak tiga orang.

Peneliti melakukan penggalan data melalui wawancara mendalam dari satu informan ke informan lainnya dan seterusnya sampai peneliti tidak menemukan informasi baru lagi. Dengan kata lain, bila mana dalam proses pengumpulan data sudah tidak lagi ditemukan variasi informasi, maka peneliti tidak perlu lagi mencari informasi baru, karena proses pengumpulan informasi sudah dianggap selesai.

Adapun yang menjadi narasumber atau *key informan* dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda, sedangkan yang menjadi informan adalah Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dan Kasi Rehabilitasi Tuna Sosial.

Untuk menunjang dan mendukung penelitian yang akan dilakukan, maka diperlukan data-data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti di Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa jenis data yaitu adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui narasumber dengan cara melakukan wawancara atau tanya-jawab secara langsung dan dipandu melalui pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian yang dipersiapkan sebelumnya oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara mendalam (*in depth interview*).
2. Data sekunder, peneliti mengumpulkan data dari sumber-sumber lain seperti:
 - a. Dokumen-dokumen Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda.
 - b. Buku-buku referensi.
 - c. Internet.

d. Skripsi.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan penulisan dengan beberapa cara yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan, penulis menggunakan perpustakaan untuk memperoleh teori-teori dasar dan konsep-konsep dari beberapa literatur yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) dalam penelitian lapangan ini penulis menggunakan cara-cara sebagai berikut :
 - a. Observasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada objek penelitian.
 - b. Wawancara, yaitu memperoleh keterangan melalui pengajuan pertanyaan secara langsung pada pihak informan.
 - c. Penelitian dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan data atau informasi dengan menggunakan dokumentasi atau arsip kantor.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis domain. Analisis domain digunakan untuk menganalisis gambaran objek peneliti secara umum atau di tingkat permukaan, namun relatif utuh tentang objek penelitian tersebut. Teknik analisis ini terkenal sebagai teknik yang dipakai dalam penelitian yang bertujuan eksplorasi. Artinya, analisis hasil penelitian ini hanya ditargetkan untuk memperoleh gambaran seutuhnya dari objek yang diteliti, tanpa harus diperincikan secara detail unsur-unsur yang ada dalam keutuhan objek penelitian tersebut.

Seorang peneliti misalnya menganalisa lembaga sosial, maka domain atau kategori simbolik dari lembaga sosial antara lain: keluarga, perguruan tinggi, rumah sakit. Sehubungan dengan kemungkinan bervariasinya domain, maka disarankan menggunakan hubungan semantik (*semantik relationship*) yang bersifat universal dalam analisis domain, yakni:

1. Jenis,
2. Ruang,
3. Sebab akibat,
4. Rasional,
5. Lokasi kegiatan,
6. Cara ke tujuan,
7. Fungsi,
8. Urutan,
9. Atribut.

Terdapat 6 langkah dalam mengaplikasikan analisis domain, yakni:

1. Memilih pola hubungan semantik tertentu atas dasar informasi atau fakta yang tersedia dalam catatan harian peneliti di lapangan,
2. Menyiapkan kerja analisis domain,
3. Memilih kesamaan-kesamaan data dari catatan harian peneliti di lapangan,
4. Mencari konsep-konsep induk dan kategori-kategori simbolik dari tertentu yang sesuai dengan suatu pola hubungan semantik,
5. Menyusun pertanyaan-pertanyaan struktural untuk masing-masing domain,
6. Membuat daftar keseluruhan domain dari seluruh data yang ada.

Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah menyampaikan pesan yang terencana dengan berbagai langkah dan metode dalam menyampaikan informasi kepada komunikan dengan memilih sasaran, menetapkan isi pesan, memilih komunikator hingga efek yang ingin dicapai dengan menentukan komunikator dan melakukan komunikasi tatap muka agar pesan yang disampaikan dapat diterima dan dimengerti oleh penerima pesan. Yang menjadi komunikator dalam penyampaian pesan tersebut adalah Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda. Komunikasi tatap muka yang digunakan adalah penyuluhan.

Secara keseluruhan, strategi komunikasi yang dilakukan oleh Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda pada dasarnya adalah untuk melakukan perubahan kepada tingkah laku penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang kerap beraksi di berbagai titik di wilayah Kota Samarinda. Kemudian memberikan arahan dan himbuan agar tidak melakukan aksi-aksi yang melanggar peraturan daerah.

Seperti yang dinyatakan oleh Pace, Peterson dan Barnett dalam Ruslan (2005:37) bahwa tujuan dari strategi komunikasi adalah *“The good which the communicator sought to achives”* yaitu bagaimana mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh pihak komunikator dari suatu proses komunikasi. Berikut peneliti akan menjabarkan dan memberikan gambaran secara singkat bagaimana strategi komunikasi yang telah dilakukan oleh pihak Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda pada tabel berikut.

Tabel 4.3 Perencanaan Strategi Komunikasi

No.	Perencanaan Kegiatan	Penyuluhan
1.	Tujuan	Memberikan informasi tentang pemahaman pola hidup mandiri.
2.	Pesan	Memberikan himbuan dan arahan berupa ajakan agar tidak kembali melakukan aktivitas yang mengganggu ketertiban umum dan sebagainya.

3.	Sasaran	Penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti Gelandangan dan pengemis, anak jalanan, penjual asongan, penjual koran, pengamen dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.
4.	Komunikator	Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda yang memiliki pengaruh serta memiliki kredibilitas dan wibawa.
5.	Efek	Adanya pemahaman tentang bagaimana pola hidup mandiri dan pemahaman dari informasi yang telah disampaikan.
6.	Waktu dan tempat	Waktunya setelah razia dengan lama 1-2 jam dan tempat penampungan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan tempat penampungan Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda.

Sumber: Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda (2013)

Sumber Pesan atau Komunikator

Dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlu adanya seorang komunikator yang memiliki pengaruh dan memiliki kepercayaan bagi komunikan dalam menyampaikan pesan. Hal ini juga diperhatikan oleh pihak Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda dalam penentuan komunikator dalam penyampaian pesan. Dalam penyampaian pesan, Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda menempatkan faktor daya tarik yang ada pada komunikator yaitu Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda dalam kegiatan penyuluhan seperti yang dijelaskan oleh Effendy, (Rudy, 2005:66) bahwa seseorang komunikator akan mempunyai kemampuan untuk melakukan perubahan sikap orang lain melalui mekanisme daya tarik. Dengan demikian mampu mendorong (memotivasi) komunikan ikut serta dalam pembentukan opini secara memuaskan atau mengarahkan perilaku dan tindakan mereka. Agar penyandang masalah kesejahteraan sosial tidak lagi melakukan aksi mereka kembali.

Dengan demikian Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda dalam menjalankan strategi komunikasinya memperhatikan beberapa hal pendukung dalam seperti penentuan komunikator dalam menyampaikan pesan yaitu tujuan dari komunikasi yang juga ditunjang dengan sumber daya manusia yang ada, serta faktor kredibilitas dan daya tarik komunikator. Dan ini semua dilakukan tentunya untuk menekan dan menangani jumlah penyandang masalah sosial yang ada di Kota Samarinda.

Isi Pesan

Dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Samarinda, Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda menyampaikan pesan-pesan seperti himbauan dan arahan. Sebelumnya juga pihak Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda juga memberikan tentang landasan hukum, peraturan daerah yang mengatur dan menjelaskan beberapa poin pentingnya terutama tentang sanksi dan denda dari setiap pelanggaran yang dilakukan.

Dalam penyuluhan tersebut, pihak Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda selalu memberikan nasehat-nasehat, arahan, ajakan, dan himbauan untuk tidak kembali melakukan aktivitas mereka sebelumnya. Kemudian pihak Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda menyampaikan beberapa hal tentang pola hidup mandiri agar mereka dapat menjalani kehidupan yang layak dan tidak menjalankan aktivitas mereka yang terdahulu dan memberikan motivasi kepada mereka agar mampu bangkit dari keadaan mereka sebelumnya.

Saluran Pesan

Dalam kegiatannya, Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda menjalankan strategi komunikasi untuk penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Samarinda yaitu dengan melakukan kegiatan penyuluhan. Dalam penyuluhan yang menjadi komunikator adalah Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda. Petugas penyuluh atau penyampai pesan dalam kegiatan penyuluhan, atau dalam bidang komunikasi disebut dengan komunikator. Pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda yang menjadi penyuluhan atau komunikator dalam penyuluhan untuk menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda karena selain mempunyai tanggung jawab terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial, Kepala Dinas juga memiliki kredibilitas baik dalam penguasaan pengetahuan serta pembuat kebijakan sehingga pesan yang disampaikan dapat tercapai sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang dikatakan oleh James Mc Croskey dalam Cangara (2009:92) bahwa kredibilitas seorang komunikator dapat dinilai dari kompetensi yang dimilikinya.

Penyuluhan yang telah dilakukan tersebut dilaksanakan di aula Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda dan terkadang juga dilakukan di tempat penampungan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda. Biasanya penyuluhan tersebut dilakukan selama 1-2 jam lamanya. Pesan yang disampaikan adalah tentang arahan dan himbauan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk mengingatkan kepada mereka bahwa untuk hidup mandiri dan tidak lagi melakukan aktivitas mereka.

Efek Pesan

Saat penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda, kepala dinas yang menjadi komunikator telah menyampaikan beberapa pesan kepada penyandang masalah sosial. Dari apa yang telah disampaikan oleh kepala dinas menimbulkan beberapa efek dan tanggapan dari

apa yang telah disampaikan. Saat penyuluhan terjadinya interaksi antara komunikator dan peserta penyuluhan yaitu adanya tanya jawab, saran dan kritik.

Beberapa pertanyaan yang dilakukan adalah tentang apa yang harus dilakukan oleh penyandang masalah sosial setelah penyuluhan dan pendataan. Dari hal ini telah diketahui bahwa saat penyuluhan terjadi pemahaman dari apa yang telah disampaikan oleh komunikator. Dan ada juga beberapa kritik dan saran yang telah disampaikan oleh peserta penyuluhan. Mereka sangat menginginkan lapangan pekerjaan dan mudah saat mendapatkan pendidikan agar mereka dapat menjalani kehidupan yang layak seperti orang kebanyakan. Dan apa yang telah disampaikan oleh peserta penyuluhan itu, pihak Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda menanggapi dengan bijak dengan segera membantu dan memberikan kesempatan peluang usaha bagi mereka yang berminat. Dan hal ini tentunya disambut baik oleh peserta penyuluhan.

Dalam komunikasi pastilah ada efek pesan atau tanggapan dari komunikasi. Hal ini terjadi pada peserta penyuluhan yang terlibat. Dan dari penyuluhan tersebut ada dampak atau efek yang terjadi pada komunikasi (penerima) setelah menerima pesan dari seorang komunikator seperti perubahan sikap, bertambahnya pengetahuan dan lain-lain.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti sebutkan dan peneliti kemukakan maka dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial sudah cukup baik namun strategi komunikasi yang mereka lakukan belumlah maksimal.

Strategi komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial hanya dengan melakukan penyuluhan dan yang menjadi pembicara adalah Kepala Dinas dari Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda. Penyuluhan itu sendiri dilakukan dengan memberikan arahan, himbauan dan ajakan kepada para penyandang masalah kesejahteraan sosial yang telah tertangkap razia di wilayah Kota Samarinda. Razia yang dilakukan tersebut merupakan kerja sama antara pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dengan Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti sebutkan dan peneliti kemukakan, maka ada beberapa saran yang perlu bagi Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial yaitu:

1. Kegiatan yang perlu dilakukan dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah tidak hanya melakukan penyuluhan. Misalnya memasang spanduk atau baliho yang ditempatkan di wilayah-wilayah yang

sering dilalui oleh penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti di Simpang Empat Mall Lembuswana, Simpang Empat Juanda, Simpang 4 Antasari, Pasar Pagi, Pasar Segiri, Jalan Pramuka.

2. Mendatangkan pembicara dalam penyuluhan bukan dari pihak Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda, melainkan dari pihak luar seperti tokoh agama, akademisi, praktisi, maupun dari lembaga-lambaga lainnya. Hal ini dilakukan untuk lebih meningkatkan kesadaran mereka terhadap aktivitas yang mereka lakukan.
3. Sebaiknya dalam kegiatan yang dilakukan tersebut perlu adanya peninjauan efektifitas agar kekurangan dan hambatan dapat segera diperbaiki dengan memperhatikan pola aktivitas dan karakteristik dari penyandang masalah sosial.
4. Jumlah razia yang perlu ditambahkan yang sebelumnya hanya 4 kali razia dalam setahun menjadi 5 atau 6 kali dalam setahun agar jumlah penyandang masalah sosial dapat berkurang.
5. Memberikan bantuan tidak hanya peralatan bengkel saja melainkan seperti bantuan dan keterampilan lain seperti jahit menjahit, kursus komputer seperti kepada penjual koran, anak jalanan, anak punk yang berusia sekolah.
6. Membuat tempat pengaduan masyarakat terhadap adanya gangguan aktivitas dari masalah kesejahteraan sosial seperti kotak keluhan, no. telepon dan lain sebagainya.

Daftar Pustaka

Buku:

- AW, Suranto. 2010. *Komunikasi Sosial Budaya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dewi, Sutrisna. 2007. *Komunikasi Bisnis*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Dilla, Sumadi. 2007. *Komunikasi Pembangunan*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Effendy, OnongUchjana. 2008. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Effendy, Onong Uchjana. 2003. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Effendy, Onong Uchjana. 2006. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Harun, Rochajat & Ardianto, Elvinaro. 2012. *Komunikasi Pembangunan Perubahan Sosial: Perspektif Dominan, KajiUlang, dan TeoriKritis*. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada.
- Huda, Miftachul. 2009. *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Kriyantono, Rachmat. 2007. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nuridin, M. Fadhil. 1990. *Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Angkasa.
- Peraturan Daerah Pemerintah Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Penertiban dan Penanggulangan Pengemis dan Anak Jalanan di Lingkungan Kota Samarinda.
- Rudy, T. May. 2005: *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Internasional*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Ruslan, Rosady. 2005. *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sastropetro, R.A. Santoso. 1987. *Pendapat Public, Pendapat Umum, dan Pendapat Khalayak Dalam Komunikasi Sosial*. Bandung: CV. Remadja Karya.
- Soegiyono. 2006. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sumarnonugroho, T. 1984. *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: PT. Hanindita.
- Suparlan, Parsudi (1984). “*Gelandangan: Sebuah Konsekuensi Perkembangan Kota, dalam Gelandangan Pandangan Ilmu Sosial*”. Jakarta: LP3ES.
- Suprpto, Tommy. 2009. *Pengantar Teori & Manajemen Komunikasi*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Widjaja, H.A.W. 2008. *Komunikasi: Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Media Internet:

- <http://database.kemsos.go.id/modules.php?name=Pmks2009&opsi=pmks2009-2>
Diakses 09 November 2013 Pukul 14.56 WITA.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Tujuan_Pembangunan_Milenium Diakses 19
Desember 2012 Pukul 15.08 WITA.
- <http://mdgs-dev.bps.go.id/> Diakses 19 Desember 2012 Pukul 15.06 WITA.
- <http://rehsos.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=1066>
Diakses 19 Desember 2012 Pukul 15.07 WITA.